

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ekonomi Pembangunan**

Dalam ekonomi pembangunan terdapat suatu pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik secara deskriptif maupun analitis, yang mana akan memberikan gambaran terkait karakteristik perekonomian masyarakat. Selain itu, ekonomi pembangunan memberikan keterangan bagaimana kebijakan yang dapat diambil dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi.

##### **1. Pembangunan Ekonomi**

Definisi pembangunan ekonomi menurut Lincolin Arsyad adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara untuk mengembangkan kegiatan perekonomian sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. Jika mengacu pada definisi tersebut maka pembangunan ekonomi itu sangat luas cakupannya tidak hanya dengan melihat pertumbuhan dari *Gross National Product* tiap tahunnya. Dimana pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yakni bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi saja akan tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Todaro menyatakan keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya tiga unsur pokok yaitu kemampuan masyarakat yang dapat berkembang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya peningkatan rasa harga diri masyarakat, dan kemampuan masyarakat yang meningkat untuk

memilih.<sup>23</sup> Jadi, selain adanya komponen pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan ekonomi, terdapat komponen lain yang juga mempengaruhi yaitu struktur sosial, sistem kelembagaan dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan akan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat.

Sukirno dalam bukunya menjelaskan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya tingkat pendapatan per kapita yang semakin terus meningkat. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita.<sup>24</sup> Adanya kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu cerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, di mana pendapatan riilnya meningkat pasti produktivitasnya juga akan meningkat.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sama-sama mempunyai arah dalam perkembangan ekonomi. Akan tetapi pembangunan ekonomi akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perubahan sistem kelembagaannya. Sehingga pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang mengakibatkan naiknya pendapatan riil perkapita suatu negara dalam jangka panjang dan disertai dengan adanya perbaikan sistem kelembagaan.

---

<sup>23</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 11

<sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hal 423

## 2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk dapat lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat memberikan rangsangan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.<sup>25</sup> Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah berarti merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang diukur dengan tinggi dan rendahnya pendapatan riil perkapita sehingga produktivitasnya akan meningkat.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap upaya pembangunan ekonomi daerah yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus berkolaborasi dengan baik dalam menentukan inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus mampu memperkirakan potensi dari setiap sumber daya yang dibutuhkan dalam merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi dimana faktor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan menjadikan suatu proses

---

<sup>25</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 374

balasan jasa. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional dan produktivitas.

### 3. Teori Pembangunan Daerah

Secara komprehensif, tidak ada teori yang dapat menerangkan pembangunan ekonomi daerah. Tetapi, secara parsial terdapat teori yang bisa digunakan untuk memahami pembangunan ekonomi. Pada dasarnya inti pembahasan dari teori-teori pembanguan ekonomi daerah berkaitan dengan metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori yang membahas tentang adanya faktor-fakor yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti yang dijelaskan dalam bukunya Lincolin, yaitu sebagai berikut.<sup>26</sup>

Pembangunan daerah = f (sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneurship*, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintahan pusat dan bantuan-bantuan pembangunan)

#### B. Pendapatan Daerah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya dibutuhkan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan daerahnya sendiri, dengan dukungan dari perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota. Pendapatan daerah telah dijelaskan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 376

dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi dari seluruh penerimaan pendapatan kas umum daerah yang diperoleh dari kemampuan daerah itu sendiri dalam memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya sehingga sumber-sumber keuangan daerahnya dapat tergali, dimana pendapatan daerah ini akan masuk dan menambah dana daerah, serta menjadi hak milik daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sendiri bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Dari ketiga pendapatan daerah yang diterima, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah, maka sumber keuangan yang menjadi ciri khas kemandirian suatu daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik, pengertian dari Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang didapat oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berguna untuk keperluan daerah yang bersangkutan demi membiayai seluruh kegiatannya.<sup>28</sup> Adapun penerimaan yang didapat pendapatan asli daerah berasal

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018...*, hal. 291

dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari adanya pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan Menurut Yani adalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diambil dari sumber hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dimana bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.<sup>29</sup>

Pendapatan asli daerah diberi arti sebagai suatu pendapatan daerah yang digantungkan pada kondisi perekonomian pada umumnya dan sumber-sumber potensi dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Sutrisno, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan mandiri suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai setiap kegiatan daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai salah satu pendapatan rutin dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang ada dari hasil usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.<sup>30</sup>

Upaya dalam menambah jumlah PAD, daerah tidak boleh menetapkan peraturan tentang pendapatan yang dapat menyebabkan biaya-biaya semakin tinggi dan tidak boleh menetapkan peraturan pendapatan daerah yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah serta kegiatan impor maupun ekspor. Peraturan daerah tentang pendapatan yang

---

<sup>29</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah...*, hal.51-52

<sup>30</sup> Parsito Sanneng, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 17

menyebabkan biaya semakin tinggi tersebut adalah peraturan yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dan hasil pendapatan itu dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah terpenting yang digunakan dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonominya dilihat dari besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, sehingga semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah yang timbul terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

## **2. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.<sup>31</sup> Dimana sumber penerimaan ini digali sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah masing-masing. Adapun sumber pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>31</sup> Suci Lestari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 26

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran-iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, yang mana digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain jenis-jenis pajak yang dijelaskan pada undang-undang yang berlaku, daerah diperbolehkan dalam menetapkan pajak lain selama masih memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>32</sup>

b. Retribusi Daerah

Seperti halnya pajak, retribusi daerah adalah pungutan-pungutan daerah yang dijadikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dimana pembayar retribusi akan langsung mendapatkan imbalan secara langsung berupa jasa atau izin tersebut yang telah diterima dan dipakai.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil yang didapatkan dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah. Jika hasil dari pengelolaan tersebut menghasilkan laba, maka laba ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

---

<sup>32</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia...*, hal.53



yang dipisahkan ini terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini terdiri dari: hasil penjualan barang milik daerah, hasil jasa giro, penerimaan dari ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan kerja daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.<sup>33</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan PAD adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari potensi daerah yang ada yaitu berupa sumber-sumber ekonomi dalam wilayah daerah masing-masing, dimana hal ini sudah di atur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang sudah diberlakukan. Adapun cara untuk menghitung besarnya pendapatan asli daerah yaitu:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 73-74

Melihat unsur-unsur dari penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dari kemandirian daerah yang terletak pada segi keuangan. Hal ini dapat menjadi cara untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah. Besarnya penerimaan PAD akan memberikan fungsi yaitu terlaksananya pembangunan ekonomi daerah. Wujud dari pembangunan daerah ini masuk dalam sektor-sektor pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menunjang berjalannya aktivitas perekonomian masyarakat dengan baik.

### **3. Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Potensi dari pendapatan asli daerah adalah besarnya kekuatan yang dimiliki suatu daerah dalam menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan. Untuk mengetahui potensi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka perlunya analisis mengenai beberapa variabel yang dapat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. variabel tersebut terdiri dari dua jenis yaitu variabel yang dapat dikendalikan (variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan variabel yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Berikut variabel-variabel yang harus dianalisis dalam mengetahui potensi PAD suatu daerah.<sup>34</sup>

#### **a. Kondisi awal suatu daerah**

Di suatu daerah sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi struktur ekonomi dan sosial daerahnya, yakni:

---

<sup>34</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah...*, hal. 101-104

*Pertama*, besar kecilnya keinginan pemerintah dalam menetapkan pungutan-pungutan di daerahnya. Masalah ini timbul karena struktur ekonomi dan sosial masyarakat menentukan pada tinggi rendahnya tuntutan pada pelayanan publik dalam segi kualitas dan kuantitas tertentu. Contohnya, pada masyarakat sektor agraris (daerah pertanian) tuntutan akan ketersediaannya fasilitas pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu akan jauh lebih rendah daripada tuntutan yang ada pada masyarakat sektor industri. Pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat agraris, akan tetapi berbeda halnya pada masyarakat industri, dimana pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan tersebut dalam memenuhi tuntutan akan pelayanan publik.

*Kedua*, kesanggupan masyarakat dalam membayar seluruh pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Dikarenakan adanya perbedaan pada struktur ekonomi dan sosial, kemampuan masyarakat dalam membayar seluruh pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah akan tetap lebih tinggi pada masyarakat industri dibandingkan masyarakat agraris. Dari paparan tersebut, bisa dikatakan bahwa pengetahuan terhadap kondisi awal suatu daerah akan sangat menentukan sumber potensi penerimaan suatu daerah. Adapun Kondisi awal ini mencakup pengetahuan terkait:

- 1) Komposisi industri yang terdapat di daerah.
- 2) Struktur sosial, politik, institusional dan berbagai macam kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.

- 3) Kecakapan administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
- 4) Tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.

Indikator yang digunakan untuk dapat melihat kondisi awal suatu daerah ialah dengan melihat kontribusi seluruh sektor perekonomian terutama sektor industri dan pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Semakin besar kontribusi sektor industri terhadap PDRB suatu daerah maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerahnya. Dan sebaliknya semakin besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB suatu daerah maka potensi penerimaan daerahnya belum tentu akan meningkat seperti sektor industri.

- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi (peningkatan cakupan) penerimaan PAD  
Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan cakupan penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam usaha peningkatan ini terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan, yakni:
  - 1) Memperbanyak obyek dan subyek pajak dan atau retribusi.  
Peningkatan cakupan PAD akan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dari obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.
  - 2) Memperbesar angka penetapan. Di dalam potensi PAD harus dipertimbangkan mengenai adanya kemungkinan kesenjangan, yang disebabkan oleh data potensi yang tidak akurat sehingga besarnya penetapan pajak dan atau retribusi daerah belum sesuai dengan potensi aslinya. Dalam meningkatkan cakupan, harus diperiksa kemungkinan

adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta taksiran terhadap besarnya potensi.

3) Mengurangi tunggakan. Peningkatan cakupan tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi angka tunggakan. Harus dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian masuk dalam langkah-langkah yang kongkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru.

c. Perkembangan PDRB Perkapita Riil

Pendapatan seseorang yang semakin meningkat maka kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Begitu juga halnya, dalam tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin besar PDRB per kapita riil suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, semakin tingginya PDRB perkapita riil suatu daerah, maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerahnya.

d. Pertumbuhan penduduk

Dalam hal tertentu, besar kecilnya pendapatan dapat juga dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. apabila jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat dipungut juga akan meningkat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

e. Tingkat inflasi

Fenomena inflasi akan menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berupa pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak pembangunan, pajak restoran. Pada pajak atau retribusi daerah dimana penetapannya didasarkan pada tarif secara tetap, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

f. Penyesuaian tarif

Kebijakan penyesuaian tarif akan menentukan peningkatan dalam pendapatan. Untuk pajak dan retribusi yang besaran tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarifnya perlu memperhatikan laju inflasi. Kegagalan dalam penyesuaian tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Selain inflasi, rangka penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, juga perlu ditinjau akan hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan asli daerah.

g. Pembangunan baru

Penambahan penerimaan PAD juga bisa didapat dari pembangunan-pembangunan baru, seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

h. Sumber pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru bisa juga mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang telah ada. Misalnya usaha persewaan *laser disc*, usaha persewaan komputer dan lain-lain.

i. Perubahan peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya peraturan yang berhubungan dengan pajak atau retribusi daerah, secara jelas akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada zaman Rasulullah saw, pemerintah melakukan pembangunan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pelayanan publik oleh Negara. Adapun biaya-biaya yang digunakan bersumber dari penerimaan pendapatan yang berada dalam Lembaga *Baitul Maal*. Adapun sumber-sumber pendapatan negara di Zaman Rasulullah saw. di klasifikasikan menjadi empat, yaitu:<sup>35</sup>

1) Zakat dan *'Ushr*

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan masyarakat dan diberikan kepada pemerintah untuk biaya kebutuhan bersama salah satunya menyangkut pengembangan SDM. Pada awal pemerintahan Islam, zakat dibayarkan dalam bentuk uang, zakat dari hasil usaha peternakan dan pertanian.<sup>36</sup> Pada periode Makkah, zakat disyariatkan sebagai anjuran untuk keadilan masyarakat dan cara untuk membebaskan dari kemiskinan dan kekafiran. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 74

<sup>36</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 257

<sup>37</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 25-26

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS.

Al-Baqarah ayat 43:<sup>38</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Artinya: Dan tegakkanlah shalat, keluarkan zakat dan shalatlah (berjama’ah) bersama orang-orang yang ruku’ ”.

‘Ushr adalah bea cukai yang dikenakan pada nilai objek barang dagang yang melintas pada wilayah Islam. ‘Ushr masuk kedalam sumber penerimaan pendapatan yang digunakan negara Islam untuk kepentingan umum Negara secara luas. Pendapatan ‘Ushr dan zakat akan dibagikan pada tingkat lokal dan jika adanya surplus pendapatan maka akan dibagikan pada delapan golongan<sup>39</sup>, seperti yang sudah dikemukakan dalam firman Allah SWT QS At-Taubah ayat 60:<sup>40</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Artinya: “Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya supaya tetap sebagai orang Islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk menegakkan agama Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketentuan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

## 2) Khums dan sedekah.

Khums merupakan harta dari rampasan perang, yakni yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS. Al- Anfal ayat 41:<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 8

<sup>39</sup> Adiwarmanto Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 74

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 197

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 183



وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّقَىٰ أَلْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Artinya: ketahuilah, bahwa apa yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah dan rasul-Nya dan untuk kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang KAMI turukan pada hamba-Ku (Muhammad) pada hari Furqan. Yaitu hari berhadapannya pasukan islam lawan pasukan kafir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Pada penjelasan ayat diatas, para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatan dari apapun yang harus dikenakan *khums* sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Jadi *Khums* didapat bukan dari hasil rampasan perang saja, akan tetapi juga barang temuan dan barang tambang.<sup>42</sup> Pendapatan *khums* dan sedekah, dibagikan kepada fakir miskin yang digunakan untuk menghidupi kesejahteraan mereka tanpa adanya diskriminasi antara orang muslim ataupun non muslim.

### 3) *Kharaj, fay'i, dan jizyah.*

*Kharraj* adalah sumber pendapatan yang pertama kalinya dikenalkan oleh Rasulullah. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah atau juga dapat disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pembayaran *kharraj* juga berbeda-beda yakni tergantung dari tingkat kesuburan tanahnya dan jenis tanamannya. *Kharraj* dikenakan pada seluruh masyarakat baik itu orang-orang muslim maupun non muslim<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami...*, hal. 264

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 257

Sedangkan *Fay'i* merupakan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. *Fay'i* disebut pendapatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas dan layanan kesejahteraan, serta bentuk perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah disebut sebagai *poll tax*, dimana jumlah *jizyah* yang dibayar harus sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh orang muslim.<sup>44</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS At-Taubah ayat 29 :<sup>45</sup>

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan tidak mengikuti agama yang benar (agama Allah) dari golongan orang-orang yang diberikan Kitab, sehingga mereka membayar upeti sedang mereka rendah diri”.

Dari ketiga jenis sumber penerimaan pendapatan diatas dari hasil yang diperoleh masing-masing pendapatan akan digunakan bagi kepentingan negara Islam itu sendiri. Pendapatan *Kharraj*, *fay'i*, dan *jizyah* ini digunakan antara lain untuk membayarkan dana pensiun, dana bantuan, biaya operasional administrasi, militer dan lain sebagainya.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 264-266

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 192.

#### 4) Pendapatan lain-lainnya

Pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang diperoleh dari adanya *kaffarah*, yaitu denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan islam. Pendapatan lainnya juga didapat dari harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris maka harta itu akan masuk kedalam pendapatan negara. Pendapatan lainnya ini akan digunakan sebagai dana sosial untuk membantu masyarakat yang memerlukan, seperti biaya perawatan anak-anak terlantar.

### C. Produk Domestik Regional Bruto

#### 1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu indikator yaitu Produk Domestik Bruto. Sedangkan pada tingkat wilayah daerah seperti Provinsi dan Kabupaten atau Kota menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto, secara teori dapat dijelaskan bahwa merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto. Sehingga apabila terjadi perubahan angka PDB akan mempengaruhi perolehan dari Produk Domestik Regional Bruto dan sebaliknya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan menjumlahkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi pada regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.<sup>46</sup>

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dimaknai sebagai jumlah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

---

<sup>46</sup> Arief Eka Atmaja, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011) hal. 15

sektor dan unit usaha dalam suatu wilayah, yang merupakan jumlah total seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang terdapat di suatu wilayah.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Sukirno, Produk Domestik Regional Bruto adalah total jumlah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu, dimana menekankan pada faktor produksi yang akan digunakan.<sup>48</sup> PDRB dapat memproyeksikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Meningkatnya angka PDRB berarti juga akan menaikkan tingkat perekonomian masyarakat sehingga produktivitas masyarakat akan naik dan menyebabkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah meningkat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tarigan dalam bukunya:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi di daerah secara menyeluruh. PDRB memberikan akibat secara langsung pada penerimaan pendapatan daerah, dimana PDRB merupakan fungsi dari PAD. Kenaikan PDRB maka dapat menambah penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai program pemerintah yakni pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan yang diterima dari jumlah total seluruh nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi...*, hal. 3

<sup>48</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hal. 34

<sup>49</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi...*, hal. 18

sektor-sektor perekonomian yang dimiliki di suatu wilayah, dalam kurun waktu tertentu. PDRB juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana dengan adanya kenaikan PDRB yang bagus akan memperlancar adanya pembangunan ekonomi daerah suatu wilayah.

## 2. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Dalam menghitung besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang didapat suatu wilayah, dapat menggunakan dua metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan perhitungan yang mengaitkan data daerah secara langsung mengenai kondisi daerah tersebut dan data yang digali dari sumber data yang ada didaerahnya sendiri. Penggunaan metode langsung ini mempunyai tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendapatan pengeluaran. Adapun ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut.<sup>50</sup>

### a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi ini adalah perhitungan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan dari seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut yang dikurangi dengan biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Sektor produksi tersebut dikelompokkan menjadi sebelas sektor atau lapangan usaha yaitu; pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 23-26

bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran ini adalah penjumlahan semua komponen dari permintaan akhir barang/jasa. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dinyatakan dengan:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Adapun komponen-komponen dari pendapatan nasional meliputi: Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (C), pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasi (I), konsumsi pemerintah (G), ekspor neto (X-M). Dimana ekspor neto ini harus dikurangi dengan nilai impor terlebih dahulu sehingga menghasilkan ekspor neto. Sehingga dari penjumlahan komponen-komponen tersebut akan didapat besarnya pendapatan nasional yang mencerminkan PDB dan PDRB di setiap wilayah.

c. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan dari segi pendapatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima yang merupakan nilai tambah dari faktor produksi yang ikut terlibat dalam proses produksi suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Perhitungan dari pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

$$Y = r + i + p + w$$

Adapun balas jasa sektor produksi dari perhitungan tersebut terdiri dari: upah dan gaji (r), pendapatan bunga (i), pendapatan bersih dari sewa

(w), dan pendapatan dari keuntungan dan usaha perorangan (p). faktor-faktor produksi yang termasuk dalam pendekatan pendapatan yaitu tenaga kerja, modal, tanah dan keahlian atau kewirausahaan.

Adapun cara yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan metode tidak langsung, yaitu dengan cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas menuju bagian wilayah masing-masing. Alokator-alokator yang digunakan dalam metode tidak langsung ini adalah:<sup>51</sup>

- a. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor maupun bagian dari sektor tersebut pada wilayah yang dialokasikan,
- b. Jumlah produksi fisik,
- c. Jumlah tenaga kerja, dan
- d. Penduduk

Dari keempat alokator diatas dalam penggunaannya dapat diambil salah satu atau dapat juga mengombinasi dari beberapa alokator sehingga dapat diperhitungkan berapa besar persentase bagian dari masing-masing provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor yang diterima.

Dalam ukuran terhadap pertumbuhan ekonomi memerlukan suatu indikator untuk mengetahui besarnya tingkat kepesatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dimana dengan indikator tersebut bisa digunakan untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat antarwilayah dan negara.<sup>52</sup> Salah satunya indikator yang dapat dijadikan

---

<sup>51</sup> Anggun Tri Wahyuni NS., *Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi*, (Lampung: IAIN Raden Intan, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 54

<sup>52</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 31

sebagai tolak ukur yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto menurut sektor lapangan usaha, dapat disajikan ke dalam dua bentuk, yakni PDRB atas Dasar Harga Konstan dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku.

Adapun PDRB atas Dasar Harga Konstan ialah menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang terlepas dari adanya unsur inflasi, sedangkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku didalamnya masih memakai unsur inflasi. Penggunaan PDRB atas Dasar Harga Konstan lebih menyajikan hasil peningkatan maupun penurunan PDRB yang konkrit, karena tidak memakai harga saat adanya inflasi yang berlangsung. Sehingga memakai perhitungan dengan atas Dasar Harga Konstan tidak akan menyesatkan bagi perekonomian wilayah.

### **3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Dengan PAD**

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi dari suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang mana akan menjadi sebuah indikator yang dapat menentukan arah dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ini digambarkan oleh adanya Produk Domestik Regional Bruto. Dalam PDRB sendiri di dalamnya juga terdiri dari data-data yang berkaitan dengan pendapatan regional yang telah didapat dari setiap sektor atau unit ekonomi. Sehingga PDRB erat kaitannya dengan pendapatan suatu daerah.

Adapun hubungan antara PDRB dengan pendapatan asli daerah merupakan sebuah hubungan secara fungsional. Hal ini dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD seperti yang dikatakan oleh Tarigan. PDRB yang



meningkat maka akan dapat menambahkan penerimaan pendapatan daerah guna membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah yang selanjutnya dapat memicu adanya dorongan terhadap peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga produktivitas masyarakatnya akan meningkat.<sup>53</sup>

Angka produktivitas masyarakat tinggi maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat sehingga semakin tinggi kemampuan orang tersebut dalam membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besarnya PDRB yang diperoleh maka semakin besar pula potensi daerah dalam menerima pendapatan daerah.<sup>54</sup> Jadi dengan adanya peningkatan dari proyeksi angka PDRB, maka itu menandakan bahwa akan mendorong banyaknya perolehan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan sebagai biaya pembangunan daerah.

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Produk Domestik Regional Bruto dijadikan sebagai indikator dalam memantau pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini bukanlah hanya sebatas menjelaskan tentang kegiatan produksi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi merupakan semua aktivitas dalam sektor produksi yang sangat berkaitan dengan adanya keadilan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga mengaitkan dengan permasalahan pertumbuhan dari sisi material dan spiritual manusia.

---

<sup>53</sup> Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu, "Analisis Pendapatan Asli Daerah...", hal. 14

<sup>54</sup> Datu K., *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 22

Pembeda dalam ekonomi islam dengan ekonomi lainnya adalah terdapat penggunaan *falah* dalam tujuannya. *Falah* yakni bentuk kesejahteraan yang hakiki, dimana *falah* ini mengandung komponen kerohanian. Dalam membahas mengenai kesejahteraan, unsur *falah* harus masuk di dalamnya. Pembahasan mengenai pendapatan berdasarkan ekonomi islam demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka harus juga memahami tentang zakat, wakaf, dan sedekah. Akan tetapi dalam islam pendapatan perkapita tinggi tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam perhitungannya harus dimasukkan adanya unsur *falah*.

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam terdapat batasan dalam pembahasannya. Batasan tersebut terletak pada persoalan ekonomi yaitu persoalan yang berkaitan dengan kekayaan dan keterbatasan dari sumber-sumber kekayaan yang ada. Ekonomi islam memandang bahwa Allah telah menyediakan kekayaan alam yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT mengenai pertumbuhan ekonomi, dalam QS Nuh ayat 10-12:<sup>55</sup>

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وَيُمْدِدْكُمْ  
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“Artinya: Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 571-572.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diambil pelajaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan dari pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi yang ada. Ekonomi islam memandang pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dari faktor-faktor produksi yang dikelola dengan benar akan terus menerus mewujudkan pertumbuhan yang akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam hanya dapat diwujudkan dan dimaksimalkan keberadaannya dengan cara mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki, sehingga akan membuat kesejahteraan meningkat.

#### **D. Jumlah Penduduk**

##### **1. Pengertian Penduduk**

Penduduk merupakan penggerak utama dari sumber daya yang ada, dimana akan memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk adalah jumlah dari orang-orang yang sah mendiami suatu daerah atau Negara, yang mana harus mentaati ketentuan peraturan dari daerah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan akan tetapi memiliki tujuan untuk menetap.<sup>56</sup>

Peranan penduduk pada perekonomian dalam konteks pasar, penduduk akan berada di sisi permintaan dan penawaran, dimana penduduk akan menjadi

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018...*, hal. 36

konsumen pada sisi permintaan dan menjadi produsen pada sisi penawaran. Penduduk juga erat kaitannya dengan pembangunan. Terdapat dua pandangan mengenai penduduk dalam sisi pembangunan, yakni dalam pandangan ilmuwan terdahulu penduduk akan menjadi penghambat bagi pembangunan, sedangkan pandangan ilmuwan terbaru penduduk akan menjadi pemacu dan penggerak dalam pembangunan.

Jika dilihat dari bentuknya, penduduk terdiri dari dua yaitu penduduk produktif, maupun tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan dambaan bagi pemerintah daerah, karena semakin produktif penduduknya maka semakin tinggi kesempatan kerja yang tercipta. Di samping itu, jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan sumber daya manusia yang terdidik akan membantu bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, adanya penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi, bertambahnya jumlah penduduk diharapkan akan diimbangi dengan kesempatan kerja dan perekonomian baru yang kemudian dalam jangka panjang akan terarah pada pembangunan ekonomi daerah. serta dapat dikatakan penduduk merupakan aset terpenting dalam kegiatan perekonomian guna membangun dan mengembangkan perekonomian itu sendiri sehingga tercipta pembangunan yang akan dicapai.

## **2. Komponen terbentuknya Pertumbuhan Penduduk**

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi. Setiap daerah memiliki target perencanaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerahnya. Dimana pertumbuhan penduduk akan dimanfaatkan untuk memenuhi terwujudnya

target tersebut dengan meningkatkan kapasitas dari penduduk agar dapat menghasilkan hasil produksi yang baik. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah tinggi maka daerah tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan tingginya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.

Pertumbuhan penduduk terbentuk akibat dari proses keseimbangan yang berubah-ubah dimana dapat mengurangi atau menambah jumlah penduduk, keseimbangan tersebut terjadi karena adanya tiga komponen yaitu:<sup>57</sup>

a. Fertilitas (kelahiran)

Dalam istilah demografi, fertilitas dimaksudkan sebagai hasil dari reproduksi dari seorang atau sekelompok wanita. Fertilitas berkaitan dengan jumlah bayi hidup yang lahir. Fertilitas merupakan kelahiran yang menyebabkan perubahan penduduk, sehingga adanya fertilitas yang tinggi akan dapat menambah jumlah penduduk di suatu daerah.

b. Mortalitas (kematian)

Mortalitas merupakan salah satu diantara tiga komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk yaitu mengurangi jumlah penduduk. Data tentang kematian dari jumlah penduduk sangat penting bagi pemerintah maupun bagi pihak swasta terutama yang bergelut dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian ini sangat penting untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk guna perancangan pembangunan yang akan berpengaruh pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Data

---

<sup>57</sup> Esi Kumalawati, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 2000-2014*”, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 22-23

kematian juga digunakan untuk pembuatan peraturan dan program-program pemerintah dalam kebijakan penduduk.

c. Migrasi

Faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi. Migrasi diartikan sebagai berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik cakupan nasional maupun internasional dengan tujuan untuk menetap. Migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah dalam masalah kepadatan dan tidak meratanya distribusi penduduk. Migrasi dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah. Sehingga dengan adanya migrasi jumlah penduduk akan berimbang, akan tetapi berbeda halnya dengan migrasi penduduk karena pengungsian sementara.

Persepsi antara menjadi penghambat atau pendukung dari tujuan pembangunan daerah, penduduk suatu wilayah tetap tergantung dari sifat dan masalah dari kependudukan masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Adapun permasalahan yang timbul dari adanya besarnya kuantitas penduduk tersebut, antara lain sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan kapasitas produksi yang baik akan menyebabkan beban pembangunan yang tinggi dimana berkaitan dalam menghasilkan kebutuhan masyarakat.
- b. Terjadinya ledakan atau kepadatan penduduk yang tidak merata akan menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan, karena pembangunan hanya terpusat pada daerah tertentu yang banyak

---

<sup>58</sup> Suci Lestari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan...*, hal. 40

penduduknya. Sehingga dalam hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat penduduk dengan daerah yang kurang penduduk.

- c. Angka urbanisasi yang tinggi di kota-kota akan menimbulkan terciptanya kawasan kumuh, sehingga timbullah kesenjangan sosial antara kelompok penduduk kaya dan kelompok penduduk yang miskin.
- d. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan adanya jumlah lapangan pekerjaan yang tinggi pula akan mengakibatkan adanya banyak pengangguran.

### **3. Teori Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan ekonomi menurut pemikiran Adam Smith disebabkan karena adanya kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pembentukan modal yang terjadi akan berpengaruh pada kemajuan teknologi, sehingga dengan adanya akumulasi modal akan ada pembagian kerja sehingga penduduk melahirkan produktivitas tenaga-tenaga kerja. Dengan begitu akan mendorong adanya investasi dan persediaan modal yang akan mendorong perkembangan teknologi dan akan berpengaruh pada pembangunan.<sup>59</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah penduduk yang diiringi dengan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan tabungan serta penggunaan skala ekonomi dalam produksi meningkat. Dengan adanya penduduk tidak semua akan menjadi masalah akan tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus dimanfaatkan agar pembangunan dan pertumbuhan

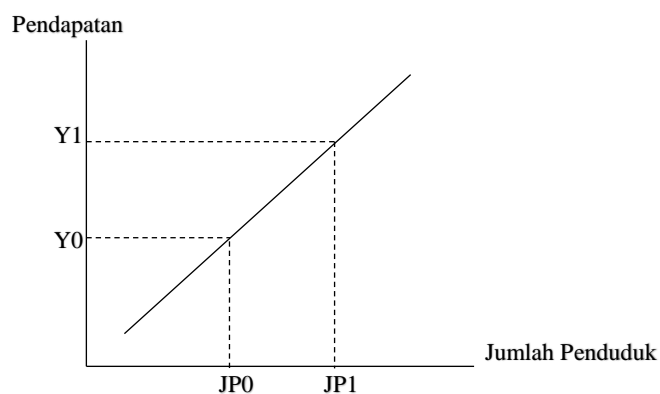
---

<sup>59</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 76

ekonomi tercapai. Dimana penduduk menjadi faktor terpenting dalam memperoleh pendapatan dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukannya.

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan dalam masyarakat, maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkatkan karena penerimaan berupa pajak maupun retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sehingga adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan angka pendapatan yang diterima. Berikut gambaran teori menurut Sukirno.

**Gambar 2.1**  
**Kurva Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan**



Sumber: Sadono Sukirno, 2015, diolah<sup>60</sup>

Gambar grafik 2.1 tersebut menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang didapat. Dengan pendapatan yang tinggi maka akan meningkatkan konsumsi dalam masyarakat, dan akan diikuti pada peningkatan produksi yang akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru. Pendirian dari sektor produksi akan meningkatkan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga apabila banyak masyarakat yang bekerja maka

<sup>60</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hal. 434



pendapatan masyarakat akan meningkat dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

Distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama pada Negara Sedang Berkembang. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan meskipun pertumbuhannya tinggi. Pada Negara Sedang Berkembang terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan pendapatan per kapita menurun
- b. Adanya inflasi, dimana pendapatan uang meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang maupun jasa
- c. Ketidakmerataan pembangunan daerah
- d. Investasi dengan padat modal lebih banyak dibandingkan padat karya sehingga mengakibatkan pengangguran bertambah
- e. Rendahnya mobilitas sosial
- f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis
- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) negara sedang berkembang dalam perdagangan negara maju, disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang
- h. Terpuruknya industri-industri kerajinan masyarakat.

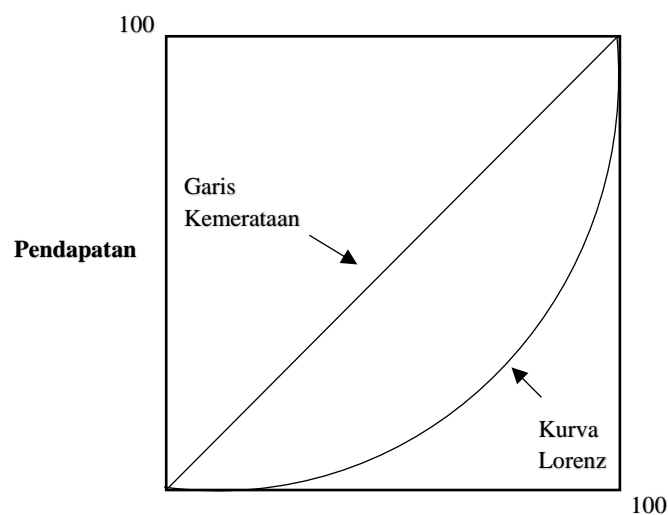
Adapun untuk mengetahui tinggi rendahnya distribusi pendapatan maupun ketimpangan atau tidak, dapat menggunakan kategorisasi dalam kurva

---

<sup>61</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 283

Lorenz. Kurva Lorenz dapat digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan penduduk dengan cara perorangan. Kurva Lorenz diperkenalkan oleh Conrad Lorenz, ahli statistik Amerika Serikat. Kurva ini menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah penduduk dengan prosentase pendapatan yang diterima, berikut gambar kurva Lorenz.

**Gambar 2.2**  
**Kurva Lorenz**



*Sumber: Lincoln Arsyad, 2015, diolah<sup>62</sup>*

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tapi dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal menggambarkan bahwa pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Garis diagonal merupakan garis pemerataan sempurna dalam distribusi ukuran persentase pendapatan yang diterima sama dengan persentase penerima pendapatan. Kurva Lorenz menjelaskan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang mereka terima.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 289

Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap wilayah terletak disebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah.

#### **4. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah**

Penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan, karena perencanaan dan realisasi perencanaan pembangunan akan ditujukan untuk kemakmuran penduduk itu sendiri. Jika kemajuan teknologi lebih cepat perkembangannya dalam daerah yang memiliki jumlah penduduk tinggi, maka daerah tersebut akan lebih cepat dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang dihasilkan oleh penduduk juga berkaitan dengan hasil pajak yang diterima pemerintah daerah dimana kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak, hal itu akan menambah pendapatan bagi daerahnya

sehingga hasil pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.<sup>63</sup>

Dalam perekonomian suatu daerah, apabila besarnya jumlah penduduk diimbangi dengan kesempatan kerja dan kemajuan teknologi yang tinggi, serta perekonomian yang stabil akan memacu adanya pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, apabila aktivitas perekonomian masyarakat meningkat dan disertai dibangunnya pusat-pusat pelayanan masyarakat, maka hal ini akan mendorong peningkatan dalam perolehan pendapatan asli daerah. Dan juga bila pelayanan masyarakat sudah terpenuhi, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan terlaksana, sehingga hasil pajak yang terkumpul akan menjadi pendapatan asli daerah.

## **5. Penduduk Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Penduduk pada dasarnya diturunkan ke bumi yaitu sebagai khalifah sedangkan dalam pandangan segi pendidikan, penduduk diartikan sebagai salah satu wujud investasi terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas dari pendidikan dapat memberikan peranan secara langsung terhadap pertumbuhan penerimaan pendapatan dengan melalui optimalisasi dan maksimalisasi keterampilan dan produktifitas kerja dari adanya penduduk. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk yang diiringi dengan tingginya mutu pendidikan maka produktivitas tenaga kerja yang tercipta akan semakin meningkat, dan juga semakin memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

---

<sup>63</sup> Oky Dwi Ayanti, dkk., “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Jurnal Institut Teknologi Sepuluh November*, 2016, hal. 6

Dengan banyaknya penduduk yang semakin produktif dan menjadi tenaga kerja serta adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, maka diharapkan hal ini akan menjadi modal dalam memperlancar pembangunan daerah yang akan menjadi sarana untuk mengurangi tingkat angka kemiskinan yang terjadi di suatu daerah dan terdapat adanya distribusi pendapatan yang dapat menolong orang-orang yang memerlukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah yaitu QS. An-Najm ayat 39:<sup>64</sup>

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Artinya: "Dan bahwasanya tidak ada hak bagi seseorang kecuali hasil usaha yang dikerjakan".*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa bekerja adalah suatu tindakan yang sangat penting dan sangat jelas telah diterangkan bahwa manusia diciptakan di bumi harus berusaha untuk bekerja keras guna dapat mencari penghidupan agar bisa memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga dengan berkerja, masyarakat akan terhindar dari ketidakmampuan dalam hidupnya atau kemiskinan, serta dengan bekerja masyarakat akan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

#### **E. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat atau pendapatan nasional, sehingga kebijakan pemerintah dapat dianalisis peranannya dalam peningkatan perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah sendiri masuk ke dalam alokasi anggaran yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke berbagai sektor dalam bentuk berbagai jenis program pemerintah guna untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya program

---

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 528.

otonomi daerah, maka setiap daerah juga berhak atas kewenangannya dalam pengeluaran pemerintah daerah yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah Daerah**

Menurut Sadono Sukirno, pengeluaran pemerintah adalah kegiatan pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah atas barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa.<sup>65</sup> Adapun penjelasan menurut Guritno, pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Dimana jika pemerintah telah mencanangkan sebuah kebijakan tertentu untuk membeli barang atau jasa, maka pengeluaran pemerintah akan menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.<sup>66</sup>

Jadi, dari pengertian-pengertian diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam bentuk pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang-barang dan jasa guna terlaksananya program-program dari kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Pengeluaran pemerintah ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, dimana masing-masing memiliki bentuk pengeluaran yang berbeda-beda.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang akan menjadi pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun tertentu, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan masing-masing untuk

---

<sup>65</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hal. 192

<sup>66</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: BPFE, 2018), hal. 169

mengatur keuangan daerahnya guna mengembangkan daerahnya. Adapun jenis pengeluaran pemerintah terdiri dari:<sup>67</sup>

a. Pengeluaran Rutin atau Belanja Operasi

Pengeluaran rutin yakni pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran-pengeluaran rutin lainnya. Anggaran dari pengeluaran rutin ini mempunyai peran penting dalam menunjang berjalannya sistem pemerintahan serta usaha dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas yang akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan dari pembangunan.

b. Pengeluaran Pembangunan atau Belanja Modal

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan umum, baik dalam bentuk pembangunan prasarana fisik maupun pembangunan non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu guna memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas. Dana anggaran pembangunan fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dan dialokasikan pada bidang-bidang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

---

<sup>67</sup> Oky Dwi Ayanti, dkk., "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran...", hal. 5

## 2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam perkembangannya, terdapat teori-teori yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, teori ini dikemukakan oleh tiga para ahli ekonomi, antara lain sebagai berikut.<sup>68</sup>

### a. Teori Rostow dan Musgrave

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ini menjelaskan tentang model pembangunan dalam perkembangan pengeluaran pemerintah. Adapun tahap-tahap pembangunan ekonomi ini yang dibagi menjadi tiga yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal dari pembangunan ekonomi ini, kontribusi investasi pemerintah terhadap investasi total harus tinggi, karena pemerintah harus menyediakan sarana prasarana untuk masyarakat.

Selanjutnya, pada tahap menengah pembangunan ekonomi kontribusi dari investasi pemerintah tetap dibutuhkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah berpindah dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesejahteraan masyarakat, dan program-program sosial lainnya.

### b. Teori Wagner

Teori Wagner ini mengemukakan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam peningkatan pendapatan perkapita. Wagner menerangkan bahwa dalam perekonomian,

---

<sup>68</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga..., hal. 170-175



apabila tingkat pendapatan per kapita tinggi, maka secara relatif besarnya pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Peranan pemerintah sangat berarti dalam mengatur hubungan di masyarakat, pendidikan, rekreasi, kebudayaan. Teori hukum Wagner ini dapat diformulasi sebagai berikut:

$$\frac{P_{KPP_1}}{PPK_1} < \frac{P_{KPP_2}}{PPK_2} < \dots < \frac{P_{KPP_n}}{PPK_n}$$

$P_{KPP}$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

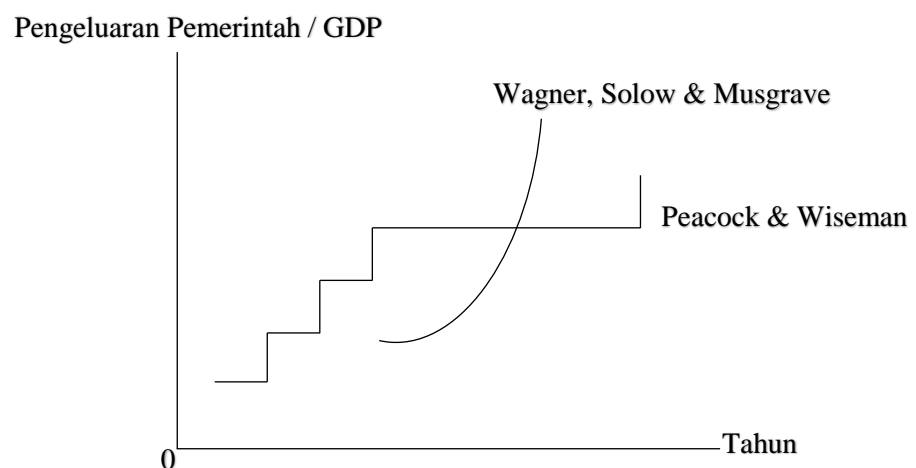
$PPK$  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1, 2, ... n : Jangka waktu (tahun)

c. Teori Peacock dan Wiseman

Pada teori Peacock dan Wiseman ini mengatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak membentuk garis lurus akan tetapi berbentuk seperti tangga yang ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut.

**Gambar 2.3**  
**Kurva Pengembangan Pengeluaran Pemerintah**



Sumber: Guritno, 2018<sup>69</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 175

Teori Peacock dan Wiseman ini disandarkan pada suatu pandangan yang mengatakan bahwa pemerintah selalu berusaha dalam memperbesar pengeluaran, sedangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang semakin berkurang. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi mengakibatkan besarnya pungutan pajak semakin meningkat meski tarif pajaknya tidak berubah dan tingginya penerimaan pajak juga menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pemerintah yang besar maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar.

### **3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah**

Pelaksanaan adanya pembangunan daerah merupakan program yang membutuhkan keterlibatan semua unsur lapisan masyarakat. Dalam pembangunan, pemerintah berperan sebagai katalisator dan fasilitator, dimana hal ini tentunya membutuhkan berbagai sarana prasarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja untuk terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>70</sup> Dari adanya pengeluaran pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mendorong tingkat kegiatan perekonomian. Dengan begitu peningkatan dari kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah juga meningkat melalui pendapatan asli daerah.

Pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi daerah dari penyediaan barang publik dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan lagi untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pajak merupakan pemasok utama dari anggaran yang digunakan

---

<sup>70</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hal. 168

untuk belanja pemerintah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur.

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah, tercipta ketika pemerintah menggunakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang menggambarkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya fasilitas pelayanan publik akan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga dengan meningkatnya perekonomian maka pemerintah berhak memungut pajak dan retribusi dari masyarakat atas jasa yang diberikan oleh pemerintah demi memfasilitasi aktivitas masyarakat dalam ekonomi. Adanya pemungutan pajak ini akan memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan PAD.

#### **4. Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pada zaman Rasulullah SAW, pemanfaatan zakat digunakan sebagai bentuk pembiayaan publik, dimana dalam zaman ini pengelolaan zakat dan distribusinya dinilai berhasil. Kebijakan pengeluaran dalam ekonomi islam adalah bagian dari kebijakan fiskal, dimana pemerintah membelanjakan pendapatan negara yang didapat. Dengan kebijakan ini negara dapat melakukan distribusi pendapatan pada masyarakat sehingga perekonomian dalam masyarakat akan bergerak.

Menurut Ibnu Taimiyah, pengelolaan pengeluaran berdasarkan prinsip dimana pendapatan pemerintah atau negara merupakan milik dari masyarakat sehingga pendapatan itu harus dibelanjakan kembali demi memenuhi

kebutuhan masyarakat yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan.<sup>71</sup> Adapun pengelolaan perolehan pendapatan pemerintah tidak serta merta semua akan dibelanjakan. Setiap pendapatan yang masuk memiliki tata cara penggunaannya masing-masing dalam pembelanjanya sehingga dapat menciptakan prospek positif dalam perekonomian.

Bentuk dari pengeluaran negara yang memberikan dampak lebih bagi kemaslahatan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pendidikan dan kebudayaan, pengembangan dari ilmu-ilmu pengetahuan, pembangunan armada perang dan pembangunan keamanan, serta penyediaan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah bentuk-bentuk hasil dari pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara umum pada masyarakat sehingga masyarakat terfasilitasi.

Dahulu dalam masa Islam, sumber pokok penerimaan pendapatan adalah didapat dari adanya penerimaan zakat dan sedekah yang dibayarkan oleh masyarakat. Akan tetapi, masuk ke dalam masa Islam modern dengan hanya mengandalkan penerimaan dari zakat dan sedekah saja belum dapat terpenuhi tujuan dari pertumbuhan perekonomian itu sendiri, sehingga dalam masa Islam modern ini pemerintah berhak mencari cara lain agar mendapatkan tambahan penerimaan yang digunakan untuk pembangunan. Dan akhirnya, pemerintah perlu mengenakan pajak baru yang dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan yang akan digunakan sebagai pengeluaran negara.

---

<sup>71</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah...*, hal. 191

## **F. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak secara umum adalah pungutan yang diambil oleh negara dari masyarakat berdasarkan undang-undang tertentu yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang dengan tidak secara langsung mendapat balas jasa atau imbalan dan hasil dari pajak akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam hal ini kas negara terbanyak selalu berisi penerimaan pajak. Antara pajak negara dan pajak daerah sebenarnya tidak memiliki perbedaan dalam prinsip-prinsip hukumnya. Adapun perbedaan pajak negara dan daerah hanyalah pada dasar pemungutan, aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Dalam wilayah daerah, Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa tertentu secara langsung yang dapat ditunjuk dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>72</sup> Pajak Daerah dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Dengan demikian, pemerintah daerah telah menetapkan pajak daerah dalam peraturan daerah, dimana wewenang dalam pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan hasil pajak daerah akan

---

<sup>72</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, hal. 68

digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah demi terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah. Sehingga Pajak daerah yang memberikan manfaat terbaik merupakan pajak yang mendukung adanya pemberian kewenangan kepada setiap daerah untuk pembiayaan desentralisasi daerah.

## 2. Jenis-Jenis dan Objek Pajak Daerah

Di Indonesia pemerintahan daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dimana keduanya diberikan kewenangan untuk menerapkan otonomi daerah. Sehingga pajak daerah juga dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut jenis-jenis dari pajak daerah beserta objeknya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.<sup>73</sup>

a. Jenis dan objek pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor. Objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objeknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objeknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 68

- 4) Pajak Air Permukaan. Objeknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - 5) Pajak Rokok. Objeknya adalah konsumsi rokok.
- b. Jenis dan objek pajak kabupaten/kota terdiri dari:
- 1) Pajak Hotel. Objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
  - 2) Pajak Restoran. Objeknya adalah pelayanan disediakan oleh restoran.
  - 3) Pajak Hiburan. Objeknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
  - 4) Pajak Reklame. Objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.
  - 5) Pajak Penerangan Jalan. Objeknya adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objeknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu kapur, batu apung, batu permata, dolomit, granit, gips, magnesit, marmer, dan lain sebagainya.
  - 7) Pajak Parkir. Objeknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  - 8) Pajak Air Tanah. Objeknya adalah pengambilan, pemanfaatan air tanah.

- 9) Pajak Sarang Burung Walet. Objeknya adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Objeknya adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **3. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

## **G. Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi secara umum dapat dikatakan sebagai pembayaran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas jasa tertentu yang telah disediakan oleh negara untuk masyarakatnya. Jika dalam konteks daerah, maka retribusi disebut sebagai retribusi daerah. Menurut Mardiasmo retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas



pemberian izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>74</sup>

Retribusi daerah dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>75</sup> Menurut Ahmad Yani, retribusi diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.<sup>76</sup> Jadi, sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi juga menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Jadi, retribusi daerah dapat dikatakan sebagai balasan yang dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan untuk pembayaran atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Besar kecilnya biaya retribusi yang dibayarkan akan tergantung pada seberapa besar dari pemakaian jasa yang telah disediakan daerah. Retribusi yang didapat akan dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk biaya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dan juga hasil retribusi akan kembali untuk pelayanan umum terkait dengan retribusi tersebut.

---

<sup>74</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 15

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>76</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia...*, hal.55

## 2. Objek dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

Adapun yang menjadi objek retribusi daerah adalah sebagai berikut.<sup>77</sup>

- a. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya prinsip komersial karena bisa pula disediakan oleh pihak swasta.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan guna untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis dari retribusi daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu secara umum dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut.<sup>78</sup>

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dipakai oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi jasa umum, yaitu:
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

---

<sup>77</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 18

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
  - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis dari retribusi jasa usaha, yaitu:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 4) Retribusi Terminal;
  - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Tempat Penginapan;

- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 10) Retribusi Penyeberangan di Air, dan
  - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi yang dikenakan atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan guna untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
  - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **3. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan teori yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa retribusi pada umumnya merupakan komponen dari sumber pendapatan bagi PAD setelah adanya pajak daerah. Bahkan besarnya retribusi daerah dapat melampaui besarnya pajak daerah. Retribusi daerah dengan pajak daerah memiliki perbedaan karakteristik, dimana retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah atas adanya pemanfaatan jasa tertentu yang telah disediakan

oleh pemerintah sehingga pembayar retribusi dapat menikmati imbalan secara langsung berupa jasa yang dipakai.

Kontribusi Retribusi daerah dalam komponen PAD mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.<sup>79</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah retribusi daerah yang ditarik mengalami kenaikan maka jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh juga akan meningkat.

#### 4. Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Didalam agama Islam telah banyak dikenal beberapa sumber penerimaan dan pendapatan keuangan negara. Sumber penerimaan ini dibagi menjadi dua yaitu pendapatan yang bersifat rutin dan bersifat secara kebetulan. Pendapatan yang bersifat rutin ini terdiri dari zakat, *Kharraj* (pajak bumi), *Jizyah* (pajak orang non muslim), dan *'ushr* (pajak ekspor impor). Sedangkan pendapatan yang bersifat kebetulan adalah *Ghanimah*, *Fay'i*, *Ma'adin*, *Rikaz*, harta peninggalan yang tidak mempunyai ahli waris, dan harta temuan. Pajak yang juga disebut *Kharraj* dalam islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu antara lain:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Regina Usman, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015), *Jurnal of Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2581-1088, September 2017, hal. 7

<sup>80</sup> Cahyadi, *Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam Perspektif Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 27

- a. Pajak yang dipungut secara adil dan sesuai dengan persyaratan.
- b. Pajak yang dipungut secara zalim, paksa dan berlebihan.

Para penguasa muslim telah mewajibkan membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan negara dalam keadaan darurat yang mana uang kas negara tidak dapat menutupi kebutuhan. Dalam hal ini para ulama memfatwakan bahwa bolehnya menetapkan pajak bagi orang-orang kaya untuk kepentingan bersama. Seperti halnya saat kas *Baitul Maal* habis dan kebutuhan negara meningkat, maka penguasa dapat menetapkan retibusi kepada orang-orang kaya yang sesuai. Berjihad dengan harta diwajibkan kepada para muslimin dan merupakan kewajiban disamping zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat ayat 15:<sup>81</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

*Artinya: sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah kemudi mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkan agama Allah, merekalah orang yang benar-benar beriman”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa diwajibkan untuk berjihad dengan harta selain kewajiban zakat. Maksudnya yaitu orang-orang kaya berhak memberikan hartanya selain zakat kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini termasuk pungutan yang di ambil dari berbagai pelayanan fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika hanya mengandalkan zakat maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak akan cukup, sehingga diwajibkan akan penetapan adanya pajak diluar zakat.

---

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 518

Setiap orang yang telah memanfaatkan fasilitas pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintahan, maka sudah kewajiban mereka untuk memberikan balasan atas manfaat yang diambil dari fasilitas tersebut. Pajak dan retribusi yang diambil akan dijadikan sebagai sumber pemasukan negara dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat secara adil dan merata. Lain halnya dengan pajak yang dipungut secara *dzalim* dan paksa oleh penguasa sehingga tidak ada kerelaan masyarakat atas harta yang diambil tersebut. Dan hal ini menyimpang dari prinsip syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat 29:<sup>82</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang bathil.”*

Dapat disimpulkan bahwa penetapan pajak dan retribusi disamping zakat dalam ekonomi islam itu dibolehkan, selama tidak ditemukannya sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat serta adanya ketentuan pengambilan pajak. Maka dari itu pajak dapat diterapkan dan dipungut oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil pajak dan retribusi juga harus dialokasikan dan didistribusikan secara merata dan adil.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 84

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, di mana secara sistematis yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*”<sup>83</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan terhadap PAD Kota Denpasar. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya secara parsial adalah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah terdapat dua variabel independen yang sama yaitu PDRB dan jumlah penduduk, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan variabel independen jumlah wisatawan dan penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah. Dan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum Akuarista dan Gregorius N. Masdjojo yang berjudul “*Kajian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Periode 2008-2012*”<sup>84</sup>, bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, PDRB, dan investasi terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. Adapun

---

<sup>83</sup> Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta, “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 5, Mei 2014, ISSN: 2303-0178, hal. 201-208

<sup>84</sup> Arum Akuarista dan Gregorius N. Masdjojo, “Kajian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Periode 2008-2012”, *Prosiding Papers Unisbank*, ISBN: 978-979-3649-81-8, hal. 1-9



metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitiannya adalah belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan PDRB dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Se Jawa Tengah. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah terdapat dua variabel independen yang sama yaitu PDRB dan pengeluaran pemerintah daerah, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut terdapat variabel independen investasi dan penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel jumlah penduduk, pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari MS yang berjudul “*Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*”<sup>85</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sarolangun. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah variabel independen yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Dan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh In Eko Pratiwi yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten*

---

<sup>85</sup> M. Zahari MS, “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”, *Jurnal Eksis*, Vol. 7, No. 2, November 2016, hal. 133-148

*Sragen Tahun 1991-2013*”<sup>86</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan Inflasi terhadap PAD di Kabupaten Sragen tahun 1991-2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan *Partial Adjustment Model (PAM)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel PDRB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jumlah penduduk dan PDRB pada variabel independent dan pendapatan asli daerah pada variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel independen yaitu inflasi, penelitian yang penulis teliti menggunakan pengeluaran pemerintah, pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gufron Reynaldin Sunandar yang berjudul “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)*”<sup>87</sup>, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi terhadap pendapatan asli daerah provinsi DI Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Adapun persamaannya dengan

---

<sup>86</sup> Iin Eko Pratiwi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015, hal. 1-13

<sup>87</sup> Gufron Reynaldin Sunandar, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)”, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2017, hal. 1-20

penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan variabel dependen PAD dan variabel independennya yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel investasi dan penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel independen pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Efriana yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surakarta Tahun 1991-2012*”<sup>88</sup>, bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, laju inflasi dan krisis ekonomi terhadap PAD di Kota Surakarta. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya adalah PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pengeluaran pemerintah, inflasi dan krisis ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surakarta. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah variabel independen yang sama yaitu PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut terdapat variabel independen inflasi dan krisis ekonomi dan penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel pajak dan retribusi daerah. Dan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Perwira, Ridwan, dan Vitanyanti Fattah yang berjudul “*Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di*

---

<sup>88</sup> Erna Efriana, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surakarta Tahun 1991-2012”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014, hal. 1-13

*Sulawesi Tengah*”<sup>89</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pengeluaran pembangunan dan jumlah penduduk produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan variabel-variabel tersebut mempengaruhi PAD dan secara parsial variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD. Adapun persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah terdapat tiga variabel independen yang digunakan dan variabel dependennya, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel independen yang peneliti gunakan yaitu pajak dan retribusi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianti Hendriyani yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)*”<sup>90</sup>, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya adalah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah variabel independen yang sama yaitu jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut terdapat variabel

---

<sup>89</sup> Ryan Perwira, dkk., “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah”, *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 6, No. 2, Februari 2018, ISSN 2302-2019, hal.1-15

<sup>90</sup> Novianti Hendriyani, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017, hal. 1-10

independen inflasi dan penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel pajak dan retribusi daerah. Dan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Mira Sari, Ethika, dan Dandes yang berjudul “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat*”<sup>91</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah PDRB tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jumlah penduduk dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan variabel PDRB, jumlah penduduk, dan retribusi daerah berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah beberapa variabel bebas dan variabel terikatnya yaitu PDRB, jumlah penduduk, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti ini menggunakan variabel bebas pengeluaran pemerintah, dan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman yang berjudul “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)*”<sup>92</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

---

<sup>91</sup> Silvia Mira Sari, dkk., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014”, *Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol. 9, No. 1, 2016, hal. 1-10

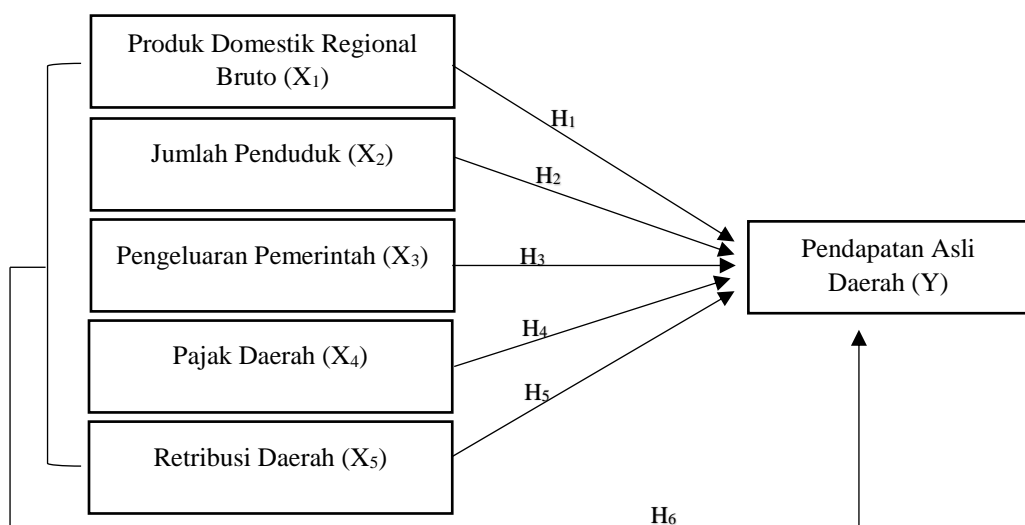
<sup>92</sup> Regina Usman, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)”, *Journal of Accounting and Finance*, Vol. 01, No. 01, September 2017, hal. 1-17

PAD di Kota Bandung. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah variabel independen yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, serta sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti menggunakan variabel PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Dan penelitian yang penulis lakukan menggunakan data panel.

### I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari arah teori dalam memberikan solusi dari permasalahan secara sistematis. Adapun skema dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Arsyad, Darwin, Guritno, Halim, Yani, Sukirno, Tarigan, diolah

Keterangan:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Tarigan<sup>93</sup>, didukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, Efriana, Akuarista, Sunandar, Perwira, Jaya, Pratiwi.
2. Pengaruh Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Arsyad<sup>94</sup>, didukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, Pratiwi, Hendriyani, Efriana, Perwira, Sunandar, Jaya.
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Sukirno<sup>95</sup> didukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendriyani, Efriana, Akuarista, Sunandar, Perwira.
4. Pengaruh Pajak Daerah ( $X_4$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan, Darwin<sup>96</sup>, didukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Usman dan Zahari.
5. Pengaruh Retribusi Daerah ( $X_5$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Yani<sup>97</sup>, didukung kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Usman, Sari, Zahari.
6. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ), Jumlah Penduduk ( $X_2$ ), Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ ), Pajak Daerah ( $X_4$ ), dan Retribusi Daerah ( $X_5$ )

---

<sup>93</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar....*, hal. 78

<sup>94</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan....*, hal. 76

<sup>95</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar....*, hal. 168

<sup>96</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah....*, hal. 68

<sup>97</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia....*, hal.55

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Halim.<sup>98</sup>

#### **J. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan dari paparan diatas maka hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- H<sub>1</sub> : Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
- H<sub>2</sub> : Diduga jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
- H<sub>3</sub> : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
- H<sub>4</sub> : Diduga pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
- H<sub>5</sub> : Diduga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
- H<sub>6</sub> : Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

---

<sup>98</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah...*, hal. 101